

INDEKS BERITA ■ ■ ■

3
Petani SPI
Teriakkan Haknya
di Istana Presiden

4
Presiden Komit-
men Mempercepat
Reforma Agraria

5
La Via Campesina
Desak PBB Segera
Atasi Krisis Pangan

*" Selamat Hari Tani Nasional bagi
seluruh petani Indonesia "*

Rais Amsar,
Majelis Nasional Petani SPI



Selamat Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA

JAKARTA. Pagi itu, 24 September 2010, langit Jakarta begitu cerah seakan mendukung perayaan Hari Raya Kaum Tani Indonesia. Ribuan massa Serikat Petani Indonesia yang berasal dari Banten dan Jawa Barat telah berkumpul untuk merayakan hari dimana Undang-Undang yang pro terhadap rakyat (baca: petani) disahkan oleh Presiden Soekarno.

50 tahun lalu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dilahirkan dan diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan kehidupan kaum tani yang lebih baik, dimana telah terjadi ketimpangan struktur agraria akibat budaya feodalisme dan praktik penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun. Walaupun kenyataannya kini kaum petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera, tapi setidaknya semangat mereka masih tetap menyala untuk menuju perubahan di Hari Tani yang ke-50 ini.

Hidup Petani !!!

Ribuan petani SPI yang berasal dari Jawa Barat dan Banten turun ke jalanan ibukota untuk memperingati Hari Tani Nasional dan Setengah Abad Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (24/09)



Dapur Tani

Saat hendak menulis refleksi Hari Tani Nasional, 24 September, yang terbayang adalah keadaan kelam, suram, dan seram.

Bulan depan di Roma, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) akan bersidang membahas kelaparan yang saat ini dialami lebih dari satu miliar jiwa. Padahal, tahun 1996 jumlahnya 825 juta. Target *Millennium Development Goals* (MDGs) untuk menghapus kelaparan 50 persen pada tahun 2015 tidak tercapai.

Awal Desember 2010 akan berlangsung sidang Conference of Parties (COP) Ke-16 tentang Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko. Banyak pihak yang pesimistis karena *Copenhagen Accord* yang dihasilkan COP sebelumnya tidak bisa menjadi pegangan.

Di Tanah Air, rakyat yang antre berdesak-desakan saat pembagian zakat menjadi bukti betapa kemiskinan lebih suram daripada angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik.

Cuaca tidak menentu telah menggagalkan rencana tanam dan panen. Adakah harapan bagi petani di tengah kekelaman itu?

Umumnya orang miskin di Indonesia adalah mereka yang tinggal di desa. Banyak penduduk desa yang menggurur karena tak memiliki tanah untuk bertani. Mayoritas hanya menguasai tanah di bawah 0,5 hektar atau 0,5-1 hektar. Mereka masuk kategori orang miskin dan rawan miskin. Merekalah yang mendapat jatah beras untuk orang miskin (raskin), penerima bantuan langsung tunai (BLT), dan pengobatan gratis. Banyak orang menilai, semua program itu bersifat karikatif, tidak membebaskan rakyat dari kemiskinan. Akan tetapi, sangat sedikit yang memberikan alternatif yang sungguh membebaskan.

Tanah untuk petani

Untuk menyejahterakan petani, pemerintah perlu segera melaksanakan landreform dengan membagikan tanah kepada orang-orang yang tak bertanah dan petani gurem. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah dicanangkan pada awal Januari 2007 dan awal Januari 2010.

Kalau sebelumnya pemerintah menyebut angka 9,6 juta hektar untuk landreform, sebaiknya jumlahnya di-genapkan menjadi 10 juta hektar. Target ini harus dicapai selama lima tahun ke depan, dengan syarat tanahnya subur dan tidak merusak hutan lindung.

- Bersambung ke edisi berikutnya -

- Henry Saragih -

Tulisan ini dimuat di harian Kompas, Jumat 24 September 2010

HARI TANI 24 SEPTEMBER

Saatnya Petani Bersatu



Gunawan Wiradi

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Aliansi Petani Indonesia (API) dan Wahana Masyarakat Tani Indonesia (WAMTI) melaksanakan Semiloka Forum Petani Nasional di gedung YTKI Jakarta (21/09). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan setengah abad Hari Tani Nasional pada 24 September.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI mengungkapkan bahwa acara ini merupakan refleksi Hari Tani yang ke-50 sekaligus ajang menuju konsolidasi petani nasional.

"Pencapaian Ormas Tani seperti SPI dan lainnya sudah cukup membanggakan dan berhasil merepresentasikan kepentingan petani kecil. Perjuangan konsolidasi yang dimulai dari kampung-kampung akhirnya berhasil membawa suara petani sampai ke tingkat internasional. Pengakuan Hak Asasi Petani oleh PBB merupakan contoh nyata dari kerja keras kita selama ini" ungkap Henry.

Henry yang menjadi narasumber dalam acara ini juga

menyampaikan bahwa anggapan umum tentang krisis pangan yang saat ini terjadi di dunia merupakan omong kosong belaka. Menurutnya pangan dunia saat ini cukup berlimpah namun bukan digunakan untuk memenuhi konsumsi manusia melainkan dijadikan bahan bakar alternatif (biofuel) dan digunakan untuk industri skala besar.

"Jadi saat ini kontrol pangan tidak lagi di tangan petani kecil, melainkan berada di perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) yang hanya berorientasikan keuntungan belaka" ujar Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).

Agusdin Pulungan dari WAMTI mengungkapkan bahwa petani bergantung pada negara. "Saat ini pembangunan sarana pertanian yang betul-betul untuk petani tidak dilakukan oleh Pemerintah kita. Distribusi anggaran yang tidak merata dimana 70 persen dialokasikan untuk pembangunan perkotaan dan sisanya untuk pedesaan adalah bukti nyata" ungkapnya.

Selain diikuti oleh 13 organisasi tani di Indonesia, acara ini juga dihadiri oleh para akademisi seperti Profesor Gunawan Wiradi dan Prof. Dr. Sediono MP. Tjondronegoro dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Acara ini juga menghadirkan M. Husein Sawit yang merupakan peneliti riset bidang ekonomi dan kebijakan pertanian sebagai narasumber.

"Saya sangat senang dan bangga bisa hadir di forum petani nasional ini. Inilah saatnya kaum tani bersatu dan bersama-sama membangun masyarakat tani di Indonesia" ungkap Gunawan Wiradi.#

HARI TANI 24 SEPTEMBER

Petani SPI Teriakkan Haknya di Istana Negara



Henry Saragih (mengangkat tangan), Ketua Umum SPI melakukan orasi politik dan menyampaikan tuntutan kaum tani di depan istana negara di Jakarta pada peringatan Hari Tani yang lalu (24/09).

(Bawah) Long march ribuan massa SPI menuju istana negaral, membawa baliho besar berisikan sembilan tuntutan kaum tani Indonesia

JAKARTA. Ribuan massa Serikat Petani Indonesia (SPI) tumpah ruah melakukan aksi di jalanan Jakarta untuk memperingati Peringatan Hari Tani Nasional dan setengah abad Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (24/09). Massa SPI yang berasal dari Banten dan Jawa Barat ini mulai berkumpul di mesjid Istiqlal Jakarta sejak Kamis malam (23/09) dan bergerak ke istana pukul 9 pagi hari jumatnya.

Agus Ruli Ardiansyah,

koordinators aksi menyebutkan bahwa tanggal 24 September ini adalah Hari Rayanya kaum tani di Indonesia.

“Jadi sebagai masyarakat tani kita wajib merayakan Hari Raya kita. Oleh karena itu hari ini kita melakukan aksi damai menuju istana negara untuk mendesak Presiden agar benar-benar serius memperhatikan kesejahteraan kaum tani. Hari ini kita teriakkan hak petani yang selama ini sering dilupakan pemerintah” teriak Ruli

sebelum melepas massa aksi.

Dalam aksi ini massa SPI membawa sembilan tuntutan yakni agar pemerintah segera redistribusikan 9,6 juta hektar tanah kepada rakyat tani melalui pembaruan agraria nasional yakni: mentertibkan dan memberdayakan 7,3 juta hektar tanah terlantar untuk pembaruan agraria dan produksi pangan untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi serta perumahan rakyat; melindungi pertanian kecil berbasis keluarga dan tolak korporatisasi pertanian—terutama proyek *food estate*; menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani; menyegerakan dibuatnya Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Petani; mencabut Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Sumber Daya Air, Pangan, Pertambangan, Penanaman Modal, Minerba, Konservasi Sumber Daya Alam, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Sistem Budidaya Tanaman, Perlindungan Varietas Tanaman, Perikanan, dan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena bertentangan dengan Pancasila dan mandat UUD 1945, serta UUPA 1960; menolak Rancangan Undang-Undang yang berpotensi merugikan kaum tani, seperti Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Pertanahan, Hortikultura.

“Kami juga menuntut agar pemerintah segera membentuk komisi Ad hoc penyelesaian konflik agraria dan pelaksana reforma agraria; melindungi dan memenuhi hak mendasar petani serta akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian; serta agar pemerintah mengakui bahwa tanggal 24 September adalah Hari Tani Nasional” ungkap Ruli yang juga Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan SPI.

Selain SPI, aksi ini juga diikuti oleh 44 organ pendukung.

Sementara itu, wakil SPI diterima oleh Staf Ahli Presiden dan pihak BPN di dalam istana. #



SPI Pertanyakan Komitmen Presiden tentang Percepatan Reforma Agraria



Henry Saragih (memakai kopiah), Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama wakil SPI dan gerakan rakyat lainnya (sebelah kanan) berdialog dengan Velix Wanggai (keenam dari kiri), Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi daerah bersama beberapa perwakilan dari staf ahli menteri dan BPN (sebelah kiri) di Istana negara, Jakarta (24/09).

JAKARTA. Di istana, massa aksi SPI pada peringatan Hari Tani dan setengah abad Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diterima Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, bersama Jusuf Gunawan Djangkar, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi. Hadir juga Yuswanda Tumenggung, Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan beberapa Deputi Sekretariat Kabinet (24/09).

Massa aksi Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Henry Saragih, Ketua Umum SPI, tiga orang petani anggota SPI, serta perwakilan dari

organisasi pendukung Aksi Hari Tani Nasional ini.

Henry Saragih menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera melaksanakan *land reform* dengan membagikan tanah kepada orang-orang yang tak bertanah dan petani gurem. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah dicanangkan pada awal Januari 2007 dan awal Januari 2010.

"Jika lahan 10 juta hektar itu didistribusikan kepada empat juta kepala keluarga petani, masing-masing akan menerima 2,5 hektar. Multieffek positif akan terjadi mulai dari

lapangan kerja yang tersedia hingga jumlah penduduk miskin yang meningkat kesejahteraannya" ungkap Henry.

"Pemerintah juga harus membatasi impor pangan. Ketergantungan pada pasar pangan dunia harus dihentikan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam cengkeraman spekulasi pangan dunia" kata Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).

Menanggapi penjelasan Henry, Velix menyebutkan bahwa penertiban tanah terlantar telah menjadi salah satu agenda nasional, sehingga apabila terdapat kasus-kasus

penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut, pihaknya terbuka untuk menerima masukan mengenai pola-pola resolusi konflik agraria yang efektif dari organisasi petani.

"Presiden SBY memberikan komitmen yang tinggi untuk percepatan pelaksanaan reforma agraria dan penataan pertanahan nasional" kata Velix.

Velix juga menyampaikan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan RUU Pertanahan dan PP Reforma Agraria yang direncanakan selesai pada Desember 2010. RUU Pertanahan juga mencakup sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Perkebunan, serta UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

"Kebijakan *land reform* dan pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya menjadi aspek penting yang tercakup dalam PP Reforma Agraria," tambah Velix.

Henry Saragih menambahkan bahwa semoga janji Presiden kali ini tidak hanya manis di mulut saja tanpa adanya pelaksanaan yang nyata.

"SPI bersama organisasi dan gerakan rakyat lainnya akan melihat selama setahun ke depan mengenai realisasi dari janji-janji Bapak Presiden karena masalah ini menyangkut hajat hidup para petani kita yang selama ini sudah terlalu sering dilupakan oleh pemerintah" tambah Henry. #



TOLAK FOOD ESTATE !!!



LEMBARAN KHUSUS

campesinos

KABAR INTERNASIONAL

PEMBARUAN TANI | CAMPESINOS | EDISI 80 | OKTOBER 2010

La Via Campesina Desak PBB Segera Atasi Krisis Pangan



Henry Saragih (Ketua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina) berpidato di forum resmi FAO. Henry mengoyak dan memakan kertas deklarasi FAO tentang *Food Security* yang dianggap gagal mengurangi, bahkan menambah angka kelaparan dunia

JAKARTA. Dari 11 - 16 Oktober 2010 ini, sidang pleno Komite Keamanan Pangan Dunia PBB diadakan di Roma, Italia. Perwakilan petani dari La Via Campesina juga hadir bersama perwakilan dari gerakan masyarakat sipil lainnya di dunia untuk meminta solusi nyata bagi krisis pangan dunia yang sudah semakin permanen.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina menyebutkan bahwa dalam pertemuan ini, pihak La Via Campesina juga akan mendesak PBB segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah

spekulasi komoditas pangan dan perampasan tanah.

"Perampasan tanah petani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab semakin memperparah krisis pangan dunia, karena sumber-sumber produksi milik petani dirampas" ungkap Henry.

Sebelumnya, organisasi akar rumput menyelenggarakan sebuah forum Organisasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan dari 8-10 Oktober ini, - juga di Roma - dan membahas usulan-usulan yang kemudian akan dipresentasikan ke Pemerintah dan PBB.

Dengan adanya reformasi

Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) dari PBB, masyarakat dan organisasi sipil kini lebih permanen berkonsultasi, tetapi partisipasi penuh para produsen makanan skala kecil (baca: petani) masih belum dijamin.

"Saat ini kebijakan pangan kita dikendalikan oleh pandangan dari negara-negara donor kaya, lembaga-lembaga tidak demokratis seperti Bank Dunia, dan perusahaan pertanian multinasional dengan anggaran lobi selangit" tutur Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Henry menambahkan,

agenda CFS menunjukkan peningkatan kepentingan para pemodal besar akan pangan dan produk pertanian melalui perampasan tanah, berspekulasi dengan komoditas pangan, dan seringnya bahan pangan digunakan sebagai agrofuel (bahan bakar alternatif). "Spekulasi keuangan telah diakui secara luas sebagai penyebab utama dari krisis pangan pada 2007-2008 dan karenanya harus berhenti di tingkat internasional atau regional jika kita benar-benar ingin mencegah hal ini terjadi lagi" tutur Henry.

Henry juga menggarisbawahi mengenai pengadopsian mekanisme untuk mengatur pasar pertanian yang selalu dikendalikan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan berbagai kebijakan perdagangan bebas regional lainnya.

"Selain itu, pencarian global untuk akuisisi besar lahan pertanian sama sekali tidak akan memperkuat produsen lokal dan hanya dapat memburuk akses mereka terhadap tanah dan karenanya harus dihentikan segera" papar Henry.

"CFS ini bisa menjadi ruang bagi pelaksanaan kedaulatan pangan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi nyata dan mau mendengarkan suara petani kecil, serta tidak memberikan legitimasi bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang berbasiskan keuntungan belaka" tambah Henry.#

PERUBAHAN IKLIM

Solusi Rakyat Melawan Perubahan Iklim

JAKARTA. Gerakan sosial dari seluruh dunia akan melakukan mobilisasi massa pada pertemuan COP 16 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang akan berlangsung di Cancun dari 29 November - 10 Desember 2010.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina mengatakan pada COP 15 di Kopenhagen tahun lalu, UNFCCC menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi akar penyebab dari kekacauan iklim saat ini.

Bahkan menurut Henry, pada saat terakhir, Amerika Serikat dengan sangat tidak demokratis mendorong sebuah kebijakan yang disebut "Persetujuan Kopenhagen", yaitu berupaya untuk memindahkan perdebatan tentang perubahan iklim keluar dari PBB dan janji-janji Kyoto serta mendukung pasar bebas sebagai solusi.

Negosiasi Iklim Berubah Menjadi Pasar yang Potensial

Negara-negara maju, secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca. Mereka cenderung menciptakan trik untuk menghindari mengurangi emisi mereka sendiri. Misalnya, "Clean Development Mechanism" (CDM) (Mekanisme Pembangunan Bersih) di bawah Protokol Kyoto yang memungkinkan negara maju

untuk terus menghasilkan gas rumah kaca dengan hanya membayar kompensasi rendah kepada negara-negara berkembang.

"Yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan-perusahaan transnasional memperoleh keuntungan ganda, mencemari lingkungan sekaligus memberikan solusi yang salah" ucap Henry.

Henry kemudian Monsanto yang mencoba meyakinkan kita bahwa perkebunan monokultur kedelai transgenik round-up siap memenuhi syarat untuk kredit karbon karena mereka berkontribusi pada pengurangan gas rumah kaca yang memanaskan bumi dengan mengumpulkan bahan organik di dalam tanah. Namun fakta mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal dekat perkebunan monokultur kedelai adalah contoh hidup dari efek buruk monokultur ini.

Alasan palsu serupa digunakan untuk menjual kredit karbon berdasarkan monokultur hutan, tanaman agrofuel, atau produksi hewan industri.

"Namun sayangnya cukup banyak pemerintahan negara berkembang yang tertarik oleh potensi keuntungan, bertaruh atas solusi palsu dan menolak untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif menghadapi perubahan iklim, seperti mendukung pertanian berkelanjutan, berorientasi produksi pada pasar internal,

dan menetapkan kebijakan penghematan energi yang efektif untuk industry" ungkap Henry.

Kami Menuntut Penerapan dari Solusi ribuan orang untuk perubahan iklim

Sekarang waktunya UNFCCC untuk memulai kebijakan tegas dan lebih berkontribusi untuk memecahkan kekacauan iklim. Negara-negara di dunia perlu mengambil komitmen yang kuat dan mengikat agar secara radikal mengurangi emisi gas dan mengubah modus produksi dan konsumsi mereka.

Perubahan iklim juga memperburuk krisis migrasi (perpindahan penduduk). Kekeringan, banjir mengerikan yang disebabkan oleh badai berat, pencemaran air, erosi tanah dan degradasi, serta dampak merusak lain dari bencana lingkungan neoliberal. Bencana lingkungan ini mengakibatkan perpindahan ribuan orang, terutama kaum perempuan dan petani dari desa yang terpaksa mereka menuju kota dan mencari sarana untuk kelangsungan hidup bagi mereka dan keluarga mereka.

Henry Saragih mengungkapkan, diperkirakan 50 juta orang telah dipaksa untuk bermigrasi karena dampak perubahan iklim.

Jumlah para pengungsi iklim ini telah membengkak menjadi 200 juta manusia, bahkan menurut IOM (*International Organization*

of Migration-Organisasi Internasional untuk Migrasi) krisis ini akan jauh lebih buruk apabila tidak segera ditangani dan merupakan salah satu kasus terburuk" jelas Henry.

Henry menambahkan bahwa La Via Campesina telah memiliki solusinya. April lalu, lebih dari 35.000 orang berkumpul di Cochabamba, Bolivia di Konferensi Rakyat tentang Perubahan Iklim dan Hak Ibu Bumi demi memperluas visi baru untuk menyelamatkan planet ini. Konferensi ini menghasilkan ribuan solusi yang datang dari orang-orang efektif untuk menghadapi krisis iklim.

"Kami menuntut UNFCCC mendukung usulan Perjanjian Rakyat di Cochabamba dan menolak semua solusi palsu untuk saat ini" sebut Henry.

Beberapa solusi yang dihasilkan di Cochabamba tersebut antara lain mempertahankan hak atas tanah dan hutan, menolak geoengineering (teknologi sejenis GMO yang cenderung merugikan petani kecil), menolak semua skema perdagangan karbon dan Mekanisme Pembangunan Bersih, dan menolak segala partisipasi Bank Dunia dalam pengelolaan dana dan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

"Kita perlu jutaan masyarakat petani dan masyarakat adat untuk memberi makan dunia dan mendinginkan planet" tambah Henry. #



GLOBALIZE HOPE

GLOBALIZE STRUGGLE

GLOBALKAN HARAPAN, GLOBALKAN PERJUANGAN

www.viacampesina.org

16 Oktober: Hari Internasional Melawan Perusahaan Agribisnis



Demo tolak Monsanto yang dilakukan oleh petani Haiti beberapa waktu yang lalu.

JAKARTA. Pada pertemuan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (*Convention in Biodiversity-CBD*) di Nagoya, Jepang, sekaligus untuk menandai Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober 2010, La Via Campesina mengajak seluruh dunia untuk mengecam perusahaan agribisnis seperti Monsanto yang berperan dalam kehancuran dan korporatisasi keanekaragaman hayati dan kehidupan.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina mengungkapkan, walaupun PBB menyatakan 2010 adalah Tahun Keanekaragaman Hayati Internasional, CBD malah berperan dalam kerusakan keanekaragaman.

"Seperti halnya hewan, warga dunia juga melihat hilangnya ribuan varietas tanaman ketika perusahaan agribisnis merusak, mencemarkan dan memprivatisasikan warisan dunia yang tersimpan di dalam

bibit dan tanaman yang dijaga generasi petani selama ribuan tahun di Bumi" ucapnya.

Sejak 1900, sekitar 90% dari keanekaragaman genetik tanaman pertanian telah hilang dari ladang petani. Keanekaragaman hayati juga terancam oleh perampasan tanah dan perpindahan masyarakat yang benar-benar melindungi keanekaragaman hayati.

Sementara itu, Henry mengemukakan bahwa perusahaan agribisnis juga berusaha untuk memonopoli bibit melalui penggunaan bibit hibrida, dan proses hukum dan paten akan benih yang membuat benih petani ilegal menjadi ilegal. hak kekayaan intelektual sistem yang ditegakkan atau dilaksanakan oleh lembaga seperti WTO atau TRIPS yang menempatkan alam ke tangan swasta.

Monsanto telah menjadi raksasa sejati - perusahaan - yang memiliki hampir seperempat dari pasar benih

yang dipatenkan di seluruh dunia, dan terus mengambil alih perusahaan benih terutama di Eropa. Sepuluh perusahaan terbesar yang mengontrol hampir 70% dari benih dunia. Perusahaan ini sekarang memasuki fase "bantuan bisnis", dengan menjual bibit di Afrika dengan Bill Gates Foundation melalui "Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika (*Alliance for a Green Revolution in Africa-AGRA*)".

Tidak hanya menjual bibit, Monsanto juga menyediakan bahan kimia beracun dengan pengaruh yang sangat buruk. Monokultur pertanian dan bahan kimia pertanian akan menghancurkan keanekaragaman hayati dunia serta masyarakat petani.

"Dalam dunia Monsanto, Syngenta, Bayer dan lain-lain, tidak ada ruang untuk keanekaragaman hayati, yang ada hanya keseragaman, bioteknologi dan keuntungan" ungkap Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia

(SPI) ini.

Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perubahan iklim, perusahaan agribisnis juga bertindak agresif dalam mempromosikan teknologi yang merusak keanekaragaman hayati seperti tanaman atau benih transgenik. Mereka juga acap kali menyajikan solusi palsu yang dijanjikan akan lebih baik untuk mengatasi perubahan iklim.

La Via Campesina tahu betul bahwa masa depan planet tergantung pada kemampuan kita untuk melindungi, memelihara dan mempromosikan keanekaragaman hayati. La Via Campesina yang terdiri dari petani baik laki-laki maupun perempuan mengusulkan untuk mengembangkan kekayaan dan keragaman pertanian kita, varietas tanaman, budaya dan tradisi pertanian. Benih adalah bagian dari warisan dunia dan harus tetap digunakan publik berbasis masyarakat, bukan kepemilikan pribadi.

"Ini adalah model pertanian para petani yang kaya atas keberagaman dan memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan perubahan demografi dan iklim yang sudah tersedia bagi kita" ujar Henry.

"Ketika kita menghadapi perusahaan agribisnis melalui alternatif lain, kita menolak untuk mengakui hak mereka sebagai pemilik keanekaragaman hayati di planet ini, dan kita juga akan menghadapi mereka melalui tindakan politik di FAO, CBD dan Perundingan iklim PBB (UNFCCC)" tambah Henry.

Akhirnya melalui La Via Campesina, Henry menyerukan aksi di seluruh dunia, pada 16 Oktober untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menghadapi perusahaan-perusahaan transnasional seperti Monsanto. #

AKSI HARI TANI 24 SEPTEMBER

Aksi Petani Mendesak Reforma Agraria di Jakarta



Seorang petani perempuan mengikuti aksi Hari Tani Nasional di Jakarta (24/09)

JAKARTA. Ribuan petani dari seluruh Indonesia menandai peringatan ke-50 Hari Tani Nasional, 24 September, dengan melakukan aksi serentak di berbagai daerah.

Di Jakarta, aksi peringatan Hari Tani Nasional ini diselenggarakan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama 44 organisasi. Untuk mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang janjinya melaksanakan reforma agraria yang diungkapkannya pada pidato di tahun 2007.

"Tidak ada pelaksanaan program apapun sampai sekarang," kata Henry Saragih, ketua SPI.

Sementara itu, ada 9,6 juta hektar tanah terlantar yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah tampaknya hanya berfokus pada "reformasi pasar agraria", sebagaimana disarankan oleh Bank Dunia 1999-2004. Ini termasuk sertifikasi, dan pendaftaran tanah. Namun, tentu saja hal ini gagal menjawab masalah kedaulatan pangan, hak asasi

manusia (terutama hak atas tanah).

Petani telah lama meratapi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah selama beberapa dekade. "Ya, jumlah konflik tanah telah menurun sejak 2009, namun, total luas lahan yang terlibat dalam konflik yang meningkat, meningkat lebih dari enam kali lipat menjadi 328.000 hektar dari 49.000 hektar pada tahun 2008," Henry Saragih lebih lanjut menyatakan.

Perluasan perkebunan oleh sektor pemerintah dan swasta juga cenderung ditutupi. Ketiadaan lahan adalah masalah besar, dengan 25,6 juta keluarga petani yang hanya memiliki rata-rata 0,4 hektar lahan.

Di Istana negara, petani perwakilan SPI bertemu dengan staf khusus Presiden. Mereka membahas sembilan tuntutan tentang program reforma agraria harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana menerapkan reforma agraria sejati dengan mendistribusikan 9,6 juta hektar berada di daftar teratas.

Petani juga meminta pemerintah untuk membuat sebuah komite ad-hoc nasional tentang konflik agraria, dan mengkaji sekitar 14 peraturan nasional yang tidak mendukung hak-hak petani.

"Pemerintah harus kembali ke jalur yang benar dalam melakukan reforma agraria," ujar salah seorang pengunjung rasa.

"Presiden harus tegas, memimpin negara untuk sebuah reforma agraria sejati yang bisa menjadi kebangkitan bangsa ini," kata peserta aksi lainnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, mengatakan bahwa 360.000 hektar lahan yang siap untuk didistribusikan tahun ini.

Namun demikian, masih banyak peraturan banyak yang

tidak sinkron dengan upaya ini.

"Ini harus menjadi salah satu fokus pemerintah-setidaknya sampai tahun 2014," tambah Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina ini.

Peringatan Hari Tani Nasional tahun ini adalah perayaan nyata dari petani kecil, masyarakat adat, buruh tani, serta petani tak bertanah. Lima puluh tahun yang lalu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) memberikan mandat kepada negara, "tanah untuk penggarap". Namun belum dilaksanakan hingga sekarang.

Bola sekarang berada di pemerintah. Satu hal yang sangat penting, kata Henry adalah program reforma agraria tidak akan ada jika tidak melibatkan masyarakat.

"Kami menghargai komitmen pemerintah untuk reforma agraria. Tetapi kami harus memastikan bahwa kami (baca:petani) adalah penerima manfaat dan kita mendapatkan hak atas tanah untuk menghasilkan makanan, "pungkasnya setelah pertemuan di Istana Presiden.#

**UUPA No. 5
TAHUN 1960
UNTUK REFORMA
AGRARIA SEJATI**

www.spi.or.id

